



The Role Of Public Sector Audit In Improving Accountability And Transparency In Local Government Financial Management

Peran Audit Sektor Publik Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Dito Aditia Darma Nst ¹⁾; Rania Rizqi ²⁾; Lili Aprilliani ³⁾; Ulfa Muharrammains ⁴⁾; Stefany Gabriella ⁵⁾
^{1,2,3,4,5)} **Universitas Pembangunan Panca Budi**

Email: ¹⁾ ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id ; ²⁾ raniazand@gmail.com ; ³⁾ liliaprilliani16@gmail.com
⁴⁾ muharrammains@gmail.com ; ⁵⁾ fanysitohang614@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [14 Desember 2025]

Revised [15 Januari 2026]

Accepted [17 Januari 2026]

KEYWORDS

Public Sector Audit,
Accountability, Transparency.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Audit sektor publik memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Berbagai permasalahan pengelolaan keuangan daerah, seperti ketidaksesuaian pencatatan, lemahnya pengendalian internal, serta rendahnya kepatuhan terhadap regulasi, menunjukkan pentingnya fungsi audit sebagai mekanisme pengawasan dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit sektor publik dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur dan analisis dokumen, meliputi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), regulasi pengelolaan keuangan daerah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa audit sektor publik berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, memperkuat sistem pengendalian internal, serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, rekomendasi hasil audit berperan sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, efektivitas audit sektor publik masih dipengaruhi oleh komitmen pimpinan daerah, tindak lanjut rekomendasi audit, dan kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan. Oleh karena itu, penguatan fungsi audit sektor publik menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada good governance.

ABSTRACT

Public sector audit plays a strategic role in promoting accountability and transparency in the management of local government finances. Various problems in regional financial management, such as inaccurate recording, weak internal control systems, and low compliance with regulations, highlight the importance of audit as an effective oversight and evaluation mechanism. This study aims to analyze the role of public sector audit in enhancing accountability and transparency in local government financial management. The research employs a qualitative approach using literature review and document analysis, including audit reports of the Audit Board of Indonesia (BPK), regulations on regional financial management, and relevant previous studies. The results indicate that public sector audit significantly contributes to improving the quality of local government financial statements, strengthening internal control systems, and encouraging compliance with applicable laws and regulations. Furthermore, audit recommendations serve as an instrument for continuous improvement in regional financial management practices. However, the effectiveness of public sector audit is influenced by the commitment of local government leaders, the follow-up of audit recommendations, and the competence of financial management personnel. Therefore, strengthening the public sector audit function is essential to achieve transparent, accountable, and good governance-oriented local government financial management.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengelolaan keuangan daerah yang tidak akuntabel berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, penyimpangan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Berbagai laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi permasalahan berulang, seperti kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta keterbatasan kualitas penyajian laporan keuangan (BPK, 2023).

Audit sektor publik memiliki peran strategis sebagai mekanisme pengawasan eksternal untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi. Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberadaan audit belum sepenuhnya menjamin perbaikan tata kelola keuangan apabila tidak diikuti dengan tindak lanjut rekomendasi audit, komitmen pimpinan daerah, serta kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi normatif audit sektor publik dan

implementasinya dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai peran audit sektor publik dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI

Audit sektor publik didefinisikan sebagai proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas pengelolaan keuangan dan kinerja entitas sektor publik guna menilai tingkat akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan (Arens et al., 2017). Akuntabilitas publik mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018), sedangkan transparansi menekankan keterbukaan informasi keuangan yang relevan, andal, dan mudah diakses (OECD, 2015). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa audit sektor publik berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah (Sari & Zuhrotun, 2017; Setyaningrum et al., 2019). Namun, efektivitas audit sangat dipengaruhi oleh kualitas auditor, sistem pengendalian internal, serta tindak lanjut atas rekomendasi audit (Ritonga et al., 2018; Putri & Mulyani, 2020). Studi lain menegaskan bahwa tanpa komitmen manajemen dan dukungan SDM yang kompeten, hasil audit cenderung bersifat administratif dan belum mampu mendorong perbaikan tata kelola secara substantif (Herawaty, 2019; Pratolo, 2020). Berdasarkan kajian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian terkait sejauh mana audit sektor publik benar-benar berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam konteks implementasi rekomendasi audit dan kapasitas kelembagaan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*review study*) dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi, laporan hasil pemeriksaan BPK, peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah, serta buku teks yang relevan dengan audit sektor publik dan akuntabilitas keuangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran database ilmiah seperti Google Scholar dan portal jurnal nasional terakreditasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan temuan penelitian berdasarkan tema peran audit sektor publik, akuntabilitas, transparansi, dan faktor pendukung maupun penghambat implementasi audit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil telaah literatur terhadap berbagai jurnal ilmiah, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta regulasi pengelolaan keuangan daerah, ditemukan bahwa audit sektor publik memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Peran tersebut tercermin dalam peningkatan kualitas laporan keuangan, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara umum memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik terhadap standar akuntansi pemerintahan dan menunjukkan tindak lanjut rekomendasi audit yang relatif lebih konsisten dibandingkan daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Tidak Wajar. Audit sektor publik mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki kelemahan dalam pencatatan, penatausahaan, serta pengungkapan informasi keuangan, khususnya terkait aset tetap, belanja modal, dan pengelolaan kewajiban.

Efektivitas audit sektor publik belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat sejumlah pemerintah daerah yang menindaklanjuti rekomendasi audit secara formal administratif tanpa diikuti perukarbaikan sistemik. Kondisi ini ditandai dengan temuan audit yang berulang, terutama terkait kelemahan sistem pengendalian internal, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta lemahnya komitmen pimpinan daerah dalam menegakkan akuntabilitas keuangan.

Selain berperan dalam meningkatkan kepatuhan dan kualitas pelaporan keuangan, audit sektor publik juga memiliki implikasi strategis terhadap perubahan perilaku organisasi pemerintah daerah. Audit tidak hanya menghasilkan opini dan rekomendasi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran institusional (*institutional learning*) yang mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki prosedur, memperkuat sistem, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas publik. Dalam konteks ini, audit sektor publik dapat dipahami sebagai instrumen transformasi tata kelola, bukan sekadar alat kontrol formal.



Temuan kajian menunjukkan bahwa dampak transformatif audit sektor publik masih bersifat tidak merata antar pemerintah daerah. Perbedaan tingkat efektivitas audit sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan kematangan sistem pengendalian internal di masing-masing daerah. Pemerintah daerah yang telah memiliki sistem pengendalian internal yang relatif mapan cenderung mampu memanfaatkan hasil audit sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Sebaliknya, pada daerah dengan sistem yang lemah, audit sering kali dipersepsikan sebagai beban administratif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak sepenuhnya diinternalisasi ke dalam praktik pengelolaan keuangan sehari-hari.

Audit sektor publik juga berperan dalam memperkuat transparansi melalui peningkatan kualitas pengungkapan informasi keuangan. Opini audit dan temuan BPK menjadi sinyal (signal) bagi publik mengenai tingkat kredibilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dalam perspektif teori sinyal (*signaling theory*), opini WTP dapat meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan, sedangkan opini selain WTP berpotensi menurunkan legitimasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, audit sektor publik tidak hanya berdampak pada aspek internal organisasi, tetapi juga pada persepsi eksternal masyarakat terhadap kinerja dan integritas pemerintah daerah.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa fokus audit sektor publik yang masih dominan pada aspek kepatuhan berpotensi membatasi kontribusinya terhadap peningkatan kinerja keuangan secara substantif. Meskipun audit kepatuhan penting untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi, penguatan audit kinerja dan audit berbasis risiko menjadi kebutuhan mendesak agar audit sektor publik mampu memberikan nilai tambah (*value added*) yang lebih besar bagi pemerintah daerah. Pendekatan audit yang lebih berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan ekonomis diharapkan dapat mendorong pengelolaan keuangan daerah yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga optimal dalam menghasilkan manfaat publik.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa audit sektor publik merupakan instrumen kunci dalam sistem akuntabilitas keuangan daerah, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh konteks implementasi di tingkat daerah. Integrasi antara hasil audit, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen pimpinan daerah menjadi prasyarat utama agar audit sektor publik mampu berfungsi secara optimal sebagai penggerak tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa audit sektor publik memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Audit sektor publik berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme pengawasan eksternal atas kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif yang mendorong perbaikan kualitas laporan keuangan, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan disiplin pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mampu menindaklanjuti rekomendasi audit secara konsisten cenderung memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih baik dan memperoleh opini audit yang lebih tinggi. Namun demikian, efektivitas audit sektor publik belum sepenuhnya optimal karena masih ditemui berbagai kendala struktural, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah, serta rendahnya komitmen pimpinan daerah dalam menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian rekomendasi audit hanya ditindaklanjuti secara administratif tanpa disertai perbaikan sistemik yang berkelanjutan.

Dengan demikian, audit sektor publik dapat dipandang sebagai katalisator penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan. Namun, keberhasilan fungsi audit sangat ditentukan oleh sinergi antara kualitas audit, keseriusan tindak lanjut rekomendasi, kapasitas kelembagaan, serta komitmen pimpinan daerah dalam mendukung reformasi pengelolaan keuangan publik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan komitmen pimpinan dan manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi audit secara substansial, tidak hanya sebatas pemenuhan administratif, agar perbaikan tata kelola keuangan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah menjadi hal yang krusial melalui pelatihan

berkelanjutan, peningkatan pemahaman terhadap regulasi terbaru, serta penataan penugasan aparatur yang lebih stabil dan profesional. Ketiga, sinergi antara auditor eksternal, aparat pengawasan internal pemerintah, dan organisasi perangkat daerah perlu diperkuat untuk memastikan bahwa temuan dan rekomendasi audit benar-benar diintegrasikan ke dalam sistem pengendalian internal dan proses pengelolaan keuangan daerah. Keempat, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris, seperti studi kasus atau metode kuantitatif, guna menguji secara lebih mendalam pengaruh audit sektor publik terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah, termasuk dengan mempertimbangkan variabel moderasi seperti kualitas sumber daya manusia dan komitmen pimpinan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- (COSO), C. o. (2013). *Internal Control Integrated Framework*. New York: AICPA.
- (UNDP), U. N. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: UNDP.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2015). *Auditing dan Jasa Assurance Jilid 2*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Boynton, W. C., Johnson, R. N., & Kell, W. G. (2003). *Modern Auditing Edisi 7 Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hayes, R., Wallage, P., & Gortemaker, H. (2017). *Prinsip-Prinsip Pengauditan : International Standards on Auditing Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, R., & Dewi, L. (2017). Pengaruh Audit Internal terhadap Efektivitas Pengawasan dalam Mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintah Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi dan Audit*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyadi. (2016). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nofianti, L. (2013). Pengaruh Audit Sektor Publik, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, dan Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap Penerapan *Good Government Governance* serta Implikasinya pada Akuntabilitas Kinerja SKPD. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis (IJEB)*.
- Nugroho, D. P. (2013). Peranan Audit Internal dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Putri, S. F. (2025). Implementasi Manajemen Audit dalam Mewujudkan Prinsip *Good Governance* di Pemerintahan Kota Metro. *Universitas Pembangunan Panca Budi*.
- Rizkina, M. (2020). Audit Sektor Publik dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Perspektif *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, Universitas Negeri Medan.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, S. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.